

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit Pemerintah merupakan unit kerja dari Instansi Pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Permasalahan yang selalu timbul adalah sulitnya meramalkan kebutuhan pelayanan yang diperlukan masyarakat maupun kebutuhan sumber daya untuk mendukungnya. Di lain pihak, Rumah Sakit harus siap setiap saat dengan sarana, prasarana tenaga maupun dana yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan tersebut. Di samping itu Rumah Sakit sebagai unit sosial dihadapkan pada semakin langkanya sumber dana untuk membiayai kebutuhannya, padahal di lain pihak Rumah Sakit diharapkan dapat bekerja dengan tarif yang dapat terjangkau oleh masyarakat luas.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut salah satu reformasi yang telah dilakukan pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik adalah dibidang keuangan yakni UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, yang tujuannya adalah untuk menjadikan pola pengelolaan keuangan yang berfokus pada *outcome*, profesional, akuntabilitas, transparansi dan peningkatan kinerja. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada *output* ini semakin menjadi praktik yang dianut luas oleh pemerintah modern diberbagai Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 68 dan 69 menyatakan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola

pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian dengan sebutan sebagai Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan pola seperti ini menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja). Hal ini sangat diperlukan bagi satuan kerja pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada publik dengan cara mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*).

Rumah Sakit Daerah merupakan satker pemerintah daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Biaya rumah sakit yang semakin meningkat dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan ini merupakan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintah, karena segmen layanannya untuk kalangan menengah ke bawah. Sumber dana yang terikat pada berbagai aturan keuangan tidak memungkinkan bagi rumah sakit menyelesaikan permasalahan keuangan yang sangat urgen seperti penyediaan obat-obat dan bahan habis pakai. Kondisi ini membuat rumah sakit pemerintah dituntut untuk melayani masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah dengan sumber dana yang terbatas serta berbagai macam aturan dan panjangnya birokrasi yang dihadapi.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan manajerialisme dalam organisasi sektor publik karena adanya tuntutan masyarakat yang semakin besar agar sektor publik bisa menghasilkan produk barang/jasa yang memiliki kualitas yang lebih baik atau minimal sama dengan yang dihasilkan oleh sektor swasta. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanannya

kepada masyarakat dan untuk memperoleh fleksibilitas manajemen, maka bentuk yang paling pas untuk sebuah rumah sakit adalah mengalihstatuskan menjadi BLUD.

Tujuan dari BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas. Birokrasi pemerintah yang dikenal tidak efektif, tidak efisien dan lambat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat akan diubah bentuknya menjadi BLU/BLUD agar lebih fleksibel dan responsiv dalam memberikan layanan secara optimal.

Pada tahun 2005 dikeluarkan PP No. 23/2005 dan Permendagri No 61/2007 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada BLU dimana semua Rumah Sakit pemerintah harus berubah statusnya menjadi BLU/BLUD. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi RS pemerintah untuk lebih otonom dibidang keuangan. Dengan demikian, prinsip efisiensi harus menjadi bagian dari sistem manajemen. Ini juga menjadi tujuan Rumah Sakit untuk meningkatkan sistem manajemen di rumah sakit pemerintah dalam pengelolaan yang lebih berjiwa kewirausahaan dengan menerapkan konsep bisnis secara sehat. Akuntansi Rumah Sakit yang merupakan salah satu kegiatan dari manajemen keuangan adalah salah satu sasaran pertama yang harus diperbaiki agar dapat memberikan data dan informasi yang akan mendukung para manajer Rumah Sakit dalam pengambilan keputusan maupun pengamatan serta pengendalian kegiatan Rumah Sakit.

Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam BLU/BLUD wajib menyusun laporan keuangannya dalam dua versi. Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pasal 26 (2) dinyatakan bahwa akuntansi dan pelaporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Di sisi lain sebagai Satker pada pemerintah, pada pasal 27 (7) menyatakan bahwa dalam melakukan penggabungan laporan keuangan BLU pada laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Keunikan dari adanya kebutuhan penyusunan laporan keuangan dengan menerapkan kedua standar tersebut merupakan masalah tersendiri dalam pengelolaan keuangan BLU/BLUD.

Penelitian yang dilakukan oleh Riawati (2013), berjudul “Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul” bertujuan untuk menganalisa implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD Panembahan Seropati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman SDM dalam pengelolaan keuangannya, sehingga apabila RSUD ingin berkembang maka pendapatan harus dikelola secara efisien dengan penganggaran yang berorientasi pada standar mutu Sistem Pengendalian Manajemen (SPM).

Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang memiliki satu Rumah Sakit Umum milik pemerintah yakni Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang (RSUD Depati Hamzah). Rumah sakit Umum Daerah Depati Hamzah termasuk dalam golongan Badan Layanan Umum Daerah dengan rumah

sakit yang berukuran besar dan cukup luas, dan masuk ke dalam kategori kelas C. Rumah sakit ini mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas. Rumah sakit ini juga menampung pelayanan rujukan dari puskesmas. Rumah sakit umum Depati Hamzah tersedia 136 tempat tidur inap, lebih banyak dibanding setiap rumah sakit di Kepulauan Bangka Belitung yang tersedia rata-rata 62 tempat tidur inap, dengan jumlah dokter yang cukup banyak, yaitu sekitar 45 orang dokter. Jumlah dokter di rumah sakit ini lebih banyak dibanding rata-rata rumah sakit di Kepulauan Bangka Belitung. Untuk pelayanan rawat inap di rumah sakit ini, tersedia 136 tempat tidur dengan 25 tempat tidur diantaranya adalah untuk kelas VIP.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul usulan penelitian proposal mengenai **“Implementasi Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka yang akan jadi pokok dalam penelitian untuk penyusunan proposal ini adalah “Bagaimanakah Implementasi Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari usulan penelitian ini adalah “Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk implementasi akuntansi Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang.”

1.4 Kontribusi Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan wawasan dan sumbangan pemikiran ilmu akuntansi terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik. Selain itu dapat memberikan informasi dan wawasan serta menjadi sumber referensi bagi akademisi maupun peneliti yang akan datang.

2. Kontribusi Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan pegawai RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dapat memberikan masukan dan saran mengenai penelitian ini, serta juga dapat menjadi acuan pegawai RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang agar dapat bekerja secara lebih maksimal lagi.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan tentang kinerja organisasi RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dalam bekerja dengan baik sehingga dapat menghasilkan *outcome* yang bermanfaat bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini, dibagi dalam 5 bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori defisini dan komponen yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan studi kasus yang dilaksanakan serta saran-saran untuk pihak pihak yang berkepentingan.